

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan dan kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan lain. Pembangunan menurut Amartya Sen: “Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan upaya peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati.” (Todaro, 2011) Tujuan pembangunan antara lain pengurangan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran; penyediaan pendidikan dasar, kesehatan, perumahan dan makanan setiap warga negara.

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua kutub strategi pembangunan yang sering kali saling mengabaikan (*trade off*). Artinya pembangunan yang mengutamakan aspek pertumbuhan ekonomi cenderung mengorbankan aspek pemerataan, begitu juga sebaliknya. Harapan pemerintah dalam memilih kebijakan yang memacu pertumbuhan ekonomi supaya lebih tinggi dengan maksud agar terjadi pemerataan hasil pembangunan akhirnya akan diraih melalui mekanis metetesan kebawah (*trickle down effect*). Namun dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, dari angka pendapatan nasional bruto (*Gross National Income = GNI*) atau produk nasional bruto (*Gross National / Domestic Product = GNP/GDP*) menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perbedaan jurang pendapatan antara kelompok kaya dan miskin yang semakin melebar.

Berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat perbedaan antar wilayah. Permasalahan disini bukan tentang kelompok kaya dan kelompok miskin, melainkan perbedaan antara daerah maju dengan daerah terbelakang.

Pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan (*disparity*) terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Golongan kaya makin kaya sedangkan kaum miskin makin miskin, wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sehingga sektor non unggulan yang membebani.

Ketimpangan pembangunan terjadi dalam skala lokal dan nasional. Dalam lingkup internasional, ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah terlihat nyata. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak mampu dieliminir secara hati-hati dapat menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi,

melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

Di samping itu, pemberian otonomi kepada daerah sangat perlu untuk memperbesar partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia dalam memberikan keputusan yang berdampak langsung kepada daerahnya, sebab sangat tidak realistis Pemerintah Pusat membuat keputusan mengenai pelayanan masyarakat untuk seluruh wilayah negara. Demikian juga diyakini bahwa masyarakat lokal melalui Kabupaten/Kota memiliki pengetahuan yang lebih tentang kebutuhan, kondisi dan yang diprioritaskan. Mobilisasi sumberdaya lebih dimungkinkan dilakukan oleh masyarakat yang dekat dengan pengambil keputusan di tingkat lokal.

Otonomi daerah, anggaran daerah menjadi pintu penting yang paling mungkin setiap daerah meminimalisir kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah tidak perlu lagi harus tergantung pada pusat dalam menentukan kebijakan publik karena daerahlah yang sebenarnya mengetahui secara pasti kebutuhannya. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, membuat mereka merasa memiliki dan mau ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan yang berlangsung. Pada intinya, desentralisasi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian suatu negara, karena efisiensi lebih mudah jika suatu kegiatan dilakukan oleh tingkat pemerintah daerah yang lebih kecil, yang lebih mengenal kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya serta lebih mampu

menanggapi permasalahan yang dihadapinya. Secara umum, efisiensi dan efektivitas yang diperoleh dari proses desentralisasi tercapai melalui pembagian tanggung jawab untuk berbagai jenis pelayanan publik kepada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan kelompok masyarakat yang memanfaatkan barang publik tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pembangunan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Ekonomi suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat diharapkan pertumbuhan tersebut dapat dinikmati merata oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan Hipotesis Kuznet mengenai kurva U-Terbalik, dimana pada tahap-tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik.

Pembangunan adalah suatu proses multi dimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2011). Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering

diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Kata kunci dari pembangunan adalah pembentukan modal, karena untuk mencapai target pembangunan yang tinggi pada suatu negara dibutuhkan nilai investasi yang besar. Sehingga strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi (Kuncoro, 2011). Selain itu, kebutuhan akan investasi yang besar dapat diperoleh juga melalui dorongan kondisi negara yang sudah lebih baik terutama sistem pelayanan serta sarana dan prasarana yang mendukung. Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti semua wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, karena adanya keterbatasan baik dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lembaga institusi yang mendukung. Perbedaan daerah dilihat dari pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu daerah saja dan tidak terjadi persebaran yang merata.

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah sebab proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah proses pembangunan akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dari hal tersebutlah, pelaksanaan pembangunan tidak jarang menciptakan adanya

ketimpangan. Untuk melancarkan program pembangunan ekonomi daerah diperlukan suatu strategi pembangunan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kota Palopo yang terdiri dari 9 kecamatan yang berada pada Satuan Wilayah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang berkembang cukup baik setelah adanya era otonomi daerah, Berbagai pencapaian telah dicapai oleh Kota Palopo dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama di bidang ekonomi, meskipun masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi lagi. Pembangunan ekonomi Kota Palopo mulai terlihat dengan adanya beberapa pengembangan potensi daerah. Hal itu terlihat dari mulai meningkatnya pengembangan sektor ekonomi seperti pengembangan sektor wisata sampai pengembangan sektor perdagangan, pendidikan. Perkembangan tersebut bisa kita lihat dari meningkatnya PDRB Kota palopo dari tahun ketahun.

No	Tahun	Persentase Perumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Ketimpangan Pembangunan (%)
1	2014	7,05	8,80
2	2015	6,45	8,58
3	2016	6,98	8,74
4	2017	7,19	8,78
5	2018	6.98	7,9

Sumber: Data BPS Kota Palopo.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisa sejauh mana pertumbuhan dan ketimpangan yang terjadi di Kota Palopo serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan dan ketimpangan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk

membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **”Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kota Palopo”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan disampaikan adalah “Apakah Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kota Palopo?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi dalam:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang ekonomi Pembangunan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai teori pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan.

##### b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan pembangunan.

##### c) Bagi Masyarakat, Khususnya di Lingkungan Perguruan Tinggi

Melalui karya ilmiah ini dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Banyak hal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pembangunan pada suatu daerah. Berdasarkan rumusan masalah, penulis memberikan ruang lingkup dan batasan dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2011) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada

gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Budiarto, 2007). Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Di sini ada dua sisi penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Kuznets dalam (Todaro, 2011) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada.

Berdasarkan definisi di atas maka ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam nilai PDB tanpa

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.

### **2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011) ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Alam Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.
- b. Organisasi Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut

Schumpeter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

- c. Akumulasi Modal Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalm bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. 13 Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.
- d. Kemajuan Teknologi Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.
- e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting didalam pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

- a. tingkat ketergantungan pada sektor primer;
- b. peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi;
- c. pembangunan infrastruktur;
- d. kualitas sumber daya manusia;
- e. tabungan masyarakat;
- f. belanja pemerintah daerah.

### **2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011).

Pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2011).

a. Teori Adam Smith

Adam Smith mengemukakan doktrinnya tentang sistem bebas berusaha, dimana campur tangan pemerintah adalah minimal, menurut kaum Klasik, bisa menjamin tercapainya:

- 1) Tingkat kegiatan ekonomi nasional yang optimal.
- 2) Alokasi sumber-sumber alam dan faktor-faktor produksi lain diantara berbagai macam kegiatan ekonomi secara efisien

b. Teori Harrod Domar

Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini melengkapi teori yang telah dikemukakan terlebih dahulu oleh Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

- 1) perekonomian bersifat tertutup;
- 2) hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan;

- 3) proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return scale*), serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja ( $n$ ) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Jhingan, 2010).

#### **2.1.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pembangunan**

Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004).

Ketimpangan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Oleh sebab itulah, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak berkembang. (Sjafrizal, 2008).

#### **2.1.5 Ketimpangan Pembangunan**

Ketimpangan pembangunan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2011). Dengan kata lain ketimpangan pembangunan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat

tersebut. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Ketimpangan wilayah adalah kondisi suatu daerah yang disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah sangat mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Pada akhirnya kegiatan produksi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat pada daerah yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang tinggi dibandingkan dengan daerah dengan sumber daya alam yang lebih rendah (Sjafrizal, 2008). Cara yang di gunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan yakni:

Menurut Sjafrizal, 2008 Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan:

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 \frac{F_i}{n}}{Y}}$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

$Y_i$  = PDRB per kapita Kecamatan di Palopo

Y = PDRB per kapita Kota Palopo

$F_i$  = Jumlah Penduduk Kecamatan di Palopo

n = Jumlah penduduk Kota Palopo

Angka indeks ketimpangan williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau pembangunan antar

wilayah semakin merata dan bila semakin jauh dari titik nol (mendekati satu) menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah secara vertical dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan.

### **2.1.6 Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah**

Ketimpangan merupakan hal umum yang terjadi dalam perekonomian suatu daerah. Ketimpangan dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing daerah. Oleh karena itu terdapat daerah maju dan daerah terbelakang di setiap daerahnya. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif terhadap masyarakat, karena ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor anugrah awal. Perbedaan tersebut yang membuat tingkat pembangunan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Sehingga menimbulkan GAP atau jurang kesejahteraan di wilayah tersebut (Kuncoro, 2011).

Douglas C North memunculkan ketimpangan antar wilayah dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori ini dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa tersebut dikenal sebagai hipotesa Neo Klasik. Menurut hipotesa Neo Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung mengalami peningkatan terus-menerus. Hal ini akan terus terjadi sehingga ketimpangan mencapai titik puncak.

Apabila proses pembangunan berlanjut, maka ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi pada negara yang sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara yang maju. Dengan kata lain kurva ketimpangan pembangunan berbentuk kurva U-terbalik. Kebenaran hipotesa Neo Klasik ini diuji oleh Williamson melalui studi ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan sedang berkembang menggunakan data time series dan cross section. Hasilnya adalah hipotesa Neo Klasik terbukti benar secara empirik. Berarti proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap pertama justru terjadi hal yang sebaliknya (Syafriзал, 2012).

Menurut Williamson hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Menurut Kuncoro, konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi, Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional (Ying, 2000). Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Indeks ketimpangan entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan atau ketimpangan antardaerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2011).

Simon Kuznet mengemukakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap berikutnya distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan. Observasi ini yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik” karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan secara modern. Hipotesis tersebut berawal dari peryumbuhan ekonomi yang awalnya meningkat pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah sampai tingkat pertumbuhan tertentu mengalami penurunan.

Kuznet menyatakan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pola U adalah kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern.

Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan Myrdal, yaitu membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan *spread effect* dan *backwash effect* sebagai pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* artinya sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan, mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dipusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Backwash effect* artinya sebagai pengaruh yang mendatangkan kerugian, mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk mengimbangi perkembangan wilayah inti.

### **2.1.7 Ukuran Ketimpangan**

#### *a. Size Distribution*

Secara umum mengukur ketimpangan yang pertama dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk miskin. Selanjutnya dapat diukur dengan melakukan perbandingan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang kaya. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.

Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk miskin menerima diatas 17 persen pendapatan nasional.

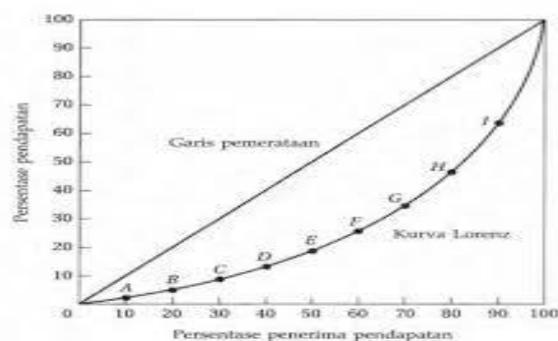
*b. Kurva Lorenz*

Kurva Lorenz diciptakan oleh Conrad Lorenz, seorang ahli Statistika dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva ini menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk dan distribusi pendapatan (Sastra, 2017). Terdapat dua sumbu yang menjadi komponen kurva ini, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk, yang digambarkan tidak dalam angka tetapi dalam bentuk persentase kumulatif. Sumbu vertikal menunjukkan total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk, yang dijelaskan tidak dalam angka tetapi juga dalam bentuk kumulatif sampai 100 persen.

Dengan demikian, kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar. Lalu terdapat garis diagonal yang kemudian digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal tersebut menunjukkan persentase pendapatan yang diterima. Garis diagonal tersebut biasa disebut sebagai garis pemerataan sempurna karena garis tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan pemerataan yang sempurna (*perfect equality*).

Jika garis diagonal dalam Kurva Lorenz ini semakin jauh maka semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataan atau tingkat ketimpangan. Keadaan yang paling ekstrim ditunjukkan apabila terjadi perhimpitan Kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertical sebelah kanan. Hal

ini disebabkan karena 19 fenomena ketidakmeataan yang sempurna, misalnya adalah keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang.



Gambar 2.1 Kurva Lorenz

### 2.1.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Gilis (2004), Produk Nasional Bruto (PNB) adalah penjumlahan nilai produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) tanpa menghitung nilai produk antara. Produk Domestik bruto (PDB) sama dengan PNB tetapi dalam perhitungannya mengeluarkan pendapatan warga negara yang berada di luar negeri tapi memasukkan seluruh produksi dalam negeri termasuk pendapatan yang diterima warga negara asing. Sedangkan PDB untuk tingkat wilayah regional pada sebuah Negara dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah tergantung oleh besarnya sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan, jumlah dan mutu sumberdaya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana

di wilayah tersebut. Terdapat beberapa ukuran pendapatan nasional , diantaranya: *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB), *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB), *Net National Product* (NNP) atau Produk Nasional Neto (PNN), dan *National Income* (NI) atau Pendapatan Nasional (PN) (Dumairy, 2004). Pengertian produk domestik regional bruto dapat didefinisikan menurut sudut pandang yang saling berbeda namun punya satu pengertian (BPS, 2010):

1. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai produksi neto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi ini didasarkan pada satu wilayah atau regional dalam jangka waktu tertentu. Klasifikasi sektor berdasarkan lapangan usaha, terbagi menjadi : pertanian, penggalian, industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan dan konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa-jasa perusahaan dan jasa-jasa.
2. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh beberapa faktor produksi dalam satu regional atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Faktor produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa adalah tanah modal tenaga dan penindak (*Entrepreneur*). Faktor produksi yang digunakan ini diberi balas jasa yang masing-masing berupa sewa, bunga, gaji atau upah, dan keuntungan atau kumpulan orang-orang dalam masyarakat, maka balas jasa yang kembali ke masyarakat disebut pendapatan.

3. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah pengeluaran oleh rumah tangga konsumsi, pemerintah, lembaga swasta tidak mencari keuntungan. Pengeluaran untuk pembentukan modal tetap, domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto disuatu daerah atau wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun.

#### **2.1.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang faktanya belum cukup memberikan sumbangan untuk pertumbuhan daerah, dengan alasan tersebut maka pemerintah harus meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber pendapatan asli daerah. Sumber tersebut yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah (Warsito, 2001). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain (Herlina Rahman, 2005). Pendapatan Asli Daerah merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah tersebut khususnya keperluan rutin. Oleh sebab itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk member keleluasaan kepada daerah dalam menggali dana dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah, terdiri dari : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, atau bentuk lain seperti akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

#### **2.10 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Ketimpangan**

PAD merupakan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Menurut Siddik (2002) kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatan sangat beragam, tergantung kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan apakah memiliki kekayaan sumber daya atau tidak. Atau daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Akibat dari perbedaan tersebut

kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidak heran apabila suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan terbelakang.

Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin besar pada antar daerah tersebut. Berdasarkan BPS Provinsi Banten, Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap masing-masing daerah tersebut yang ada di Provinsi Banten. Namun, masih terdapat ketimpangan pada masing-masing daerah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan dana perimbangan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah guna untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Maretha Berlianantiya (2017) dengan judul Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur, hasil penelitiannya adalah (1) Pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan cenderung berbentuk U, sehingga hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jawa Timur, dan nilai korelasi product moment negatif dan tidak signifikan, sehingga tidak dapat menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan (2) Pada masing-masing Bakorwil, pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi terbukti

dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, demikian juga dengan nilai korelasinya.

Pipit Mandasari (2017) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh, dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  untuk variabel X1 (pertumbuhan ekonomi) adalah  $0,077 < 0,723$ . Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel X1 (pertumbuhan ekonomi) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh. Kemudian hasil penelitian menunjukkan nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  untuk variabel X2 Kemiskinan adalah  $-0,107 > -0,829$ . Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel X2 (kemiskinan) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh. Nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  adalah  $0,073 < 0,930$ . Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima, yang artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. Nilai  $R^2$  sebesar 0,020 atau 2,0 persen. Hasil ini menunjukkan variabel Ketimpangan dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan sebesar 2,0 persen, selebihnya Ketimpangan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 98 persen yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan I Komang Oka Artana Yasa (2015) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui disparitas pendapatan antar daerah Provinsi Bali dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapat antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis Indeks Williamson dan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan disparitas pendapatan antar daerah Provinsi Bali tahun 2001-2012 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,29 artinya tingkat disparitas tergolong rendah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antar daerah. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal (2017) Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian, dan juga sebagai faktor pendorong produktivitas daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah dan menganalisis pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson dan Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang signifikan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Aceh adalah variabel listrik yang berpengaruh sebesar -0,012594 dan variabel

pendidikan yang berpengaruh sebesar  $-0,060347$ . Variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah jalan berpengaruh sebesar  $-0,009463$  dan variabel kesehatan berpengaruh sebesar  $0,046067$ .

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Cahyono (2015) dengan judul *Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo*. Hasil penelitian menunjukkan ada empat tipologi ekonomi di DAS Bengawan Solo berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Kabupaten di daerah hilir lebih maju dan berkembang pesat dibandingkan dengan daerah hulu dengan kesenjangan ekonomi sedang. Secara keseluruhan kesenjangan ekonomi antar daerah di dalam DAS Bengawan Solo tergolong tinggi (0,61).

Penelitian yang dilakukan Muh. Hamid (2016) *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat*. Hasil penelitian dengan Analisis Tipologi Klassen menggambarkan bahwa ada perbedaan pola dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yaitu: ada dua wilayah dalam Kuadran I (tumbuh cepat) dan empat wilayah dalam Kuadran IV (relatif tertinggal), serta dalam analisis Indeks Williamson memperlihatkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong rendah dengan rata-rata 0,350. Sementara Hipotesis Kuznets tentang U-Terbalik yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan belum berlaku di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2015.

Penelitian yang dilakukan Khairul Amri (2017) *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Data yang digunakan adalah data panel dari 8 Provinsi di Sumatera selama periode tahun 2007-2015. Peralatan analisis data yang digunakan adalah panel *vector autoregression* (PVAR) dan panel *granger causality test*. Penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Ketimpangan pendapatan pada periode tahun tertentu juga secara signifikan dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan tahun sebelumnya. Hasil panel *granger causality test* menemukan adanya *unidirectional causality* dari ketimpangan pendapatan ke pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Hendarmin (2019) Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang diperoleh dari regresi data panel pendekatan *fixed effect* ditemukan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan variabel modal manusia yang diproksi dengan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan modal manusia secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Perlu adanya penyediaan pelayanan publik agar kesenjangan antar daerah kota dan kabupaten tidak semakin lebar. Tujuan

pembangunan tidak semata berorientasi pada mengejar pertumbuhan yang tinggi tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan dan kesejahteraan.

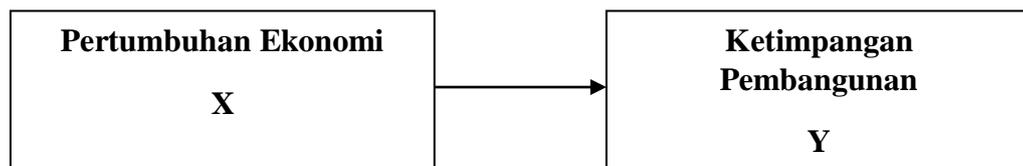
Penelitian yang dilakukan Liling Vera Yusica dkk (2018) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan wilayah serta menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan analisis PDRB per kapita tingkat ketimpangan wilayah di provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan ketimpangan wilayah yang lemah karena rata-rata masih menunjukkan angka negatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah serta variabel aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Penelitian yang dilakukan Mara Judan Rambey (2018) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Studi ini Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Menggunakan data panel dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 seluruh Provinsi di Indonesia. Analisis menggunakan persamaan regresi sederhana. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Namun perkembangan pertumbuhan ekonomi saat ini masih menunjukkan ketidakmerataan dalam peningkatan kesejahteraan tersebut yang ditunjukkan dengan adanya ketimpangan perolehan pendapatan antar daerah.

Ketimpangan pembangunan di Kota Palopo pada penelitian ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, PDRB, PAD. Apabila pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan PAD, tidak merata antara satu daerah dengan daerah lain, maka keadaan ini akan mendorong terjadinya kenaikan ketimpangan pembangunan di Kota Palopo



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo Jl. Patang II, Tomarunding, Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91913. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai Oktober 2020.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang bersifat kuantitatif dalam bentuk tahunan (*time series*) periode 2016-2018. Data tersebut bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, yakni *www.palopokota.bps.go.id* publikasi tahunan Kota Palopo dalam Angka, publikasi tahunan.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo tahun 2016 hingga 2018. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

### 3.3.1 Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala yang sedang diteliti dengan cara terjun langsung ke lapangan pada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo.

### 3.3.2 Metode dokumentasi

Menurut Arikunto (2015) Metode dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan surat lainnya.

## 3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Pertumbuhan Ekonomi mod dan Ketimpangan Pembangunan. Penulis mengelompokan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 3.4.1 Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (X) variable ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, abtecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya *variabel dependen* (terikat). (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kota Palopo, Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo mengalami Fluktuasi atau naik turunnya pertumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin secara eksplisit dan diartikan sebagai pertumbuhan sehingga dalam periode tertentu dapat diartikan sebagai seluruh peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara eksplisit dapat diartikan adanya peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tahun tersebut. Karena itu, seluruh kegiatan pembangunan harus difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dalam periode tertentu dapat diartikan, ini dikarenakan seluruh pembangunan terdapat pada wilayah Palopo saja.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya adalah menganalisis data tersebut, melalui perhitungan statistik untuk menguji hipotesis pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi di Kota Palopo.

3.5.1 Indeks Ketimpangan adalah sebagai indeks ketimpangan regional (*Regional Inequality*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 \frac{F_i}{n}}{Y}}$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

$Y_i$  = PDRB per kapita Kecamatan di Palopo

$Y$  = PDRB per kapita Kota Palopo

$F_i$  = Jumlah Penduduk Kecamatan di Palopo

$n$  = Jumlah penduduk Kota Palopo

Arsyad (2010) menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat Indeks Williamson sebagai berikut:

- a. Ketimpangan Tinggi jika  $IW > 0,35$
- b. Ketimpangan Sedang jika  $IW = 0,21 - 0,35$
- c. Ketimpangan Rendah jika  $IW = < 0,20$

### 3.5.2 Analisis Regresi Sederhana

Penerapan analisis regresi sederhana Menurut Sugiyono(2016)sebagai berikut :

“Analisis regresi linier digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya)variabel dependen (*kriterium*), bila dua atau lebih variabelindependen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlahvariabel independennya minimal dua.”

Penjelasan garis regresi menurut Andi Supangat (2007) sebagai berikut: “Garis regresi (*regression line/line of the best fit/estimating line*)adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter diagram*)sedemikian rupa sehingga dapat

dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya).”

Untuk dapat membuat ramalan melalui regresi, maka data setiap variabel harus tersedia. Selanjutnya berdasarkan data itu peneliti harus dapat menemukan persamaan melalui perhitungan. Dimana persamaan regresi untuk dua variabel adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X + e$$

Dimana :

Y = Variabel Dependen ( Ketimpangan Pembangunan)

a = Konstanta

X = variabel Dependen (Petumbuhan Ekonomi)

e = Standar Error

$\beta$  = koefisien Regresi (Parameter)

### 3.6 Defenisi Operasional

3.6.1 Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

3.6.2 Ketimpangan pembangunan adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah secara vertical dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kota Palopo**

##### **4.1.1 Sejarah Kota Palopo**

**Kota Palopo** adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.

Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 km<sup>2</sup><sup>[2]</sup> dan pada akhir tahun 2019 berpenduduk sebanyak 182.107 jiwa

##### **4.1.2 Geografis**

Secara geografis Kota Palopo berada pada bagian pesisir Utara dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan bentuk topografi daerah pegunungan dibagian barat yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang termasuk dalam Ekosistem Leuser, serta dataran rendah dan pesisir pantai dibagian timur.

Berdasarkan kedudukan dan letak wilayah Kota Palopo yang diapit oleh Pegunungan Bukit Barisan dan pesisir pantai, Kota Palopo mempunyai posisi yang sangat strategis dan berpeluang dalam pengembangan bidang ekonomi, industri, perdagangan dan jasa. Kota Palopo dengan luas wilayahnya 247,52 km<sup>2</sup> dan pada akhir 2015 berpenduduk sebanyak 168.894 jiwa, terletak pada 02°53'15"

- 03°04'08" LS dan 120°03'10" - 120°14'34" BT dengan batas administratif sebagai berikut:

a. Sebelah Utara	:	Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
b. Sebelah Selatan	:	Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
c. Sebelah Barat	:	Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
d. Sebelah Timur	:	Teluk Bone

Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Tabel 4.1 Pembagian wilayah-wilayah daerah Kota Palopo

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Kecamatan Wara	32.026	11,49	6	2.787
2	Kecamatan Telluwanua	12.076	34,34	7	352
3	Kecamatan Wara Utara	19.628	10,58	6	1.855
4	Kecamatan Wara Barat	9.706	54,13	5	179
5	Kecamatan Wara Timur	31.998	12,08	7	2.649
6	Kecamatan Mungkajang	7.205	53,80	4	134
7	Kecamatan Sendana	5.915	37,09	4	159
8	Kecamatan Bara	23.701	23,35	5	1.015
9	Kecamatan Wara Selatan	10.448	10,66	4	980

Sumber : Palopo dalam Angka 2020

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa kecamatan yang paling terluas di kota Palopo adalah Kecamatan wara barat dengan luas wilayah 54,13 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sekitar 179 jiwa/ km<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk sekitar 9.706 orang. Sedangkan kecamatan yang terkecil adalah kecamatan wara utara dengan luas wilayah 10,58 km<sup>2</sup> hanya berbeda sedikit dengan kecamatan wara selatan yaitu 10,66 km<sup>2</sup>, kecamatan wara utara memiliki kepadatan penduduk sekitar 1.855 jiwa/ km<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk 19.628 orang .

#### 1. Perekonomian

Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Palopo mencapai 8,8 persen. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini, Palopo tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Harapan ini tentu bukanlah harapan kosong belaka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik ketiga di Sulawesi Selatan. Inilah doktrin “wanua mappatuwo”. Palopo dan Tana Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan.

Keterbukaan, kedekatan dan makin bersahabatnya Pemerintah Kota Palopo dengan masyarakat ini kemudian diikuti dengan kepercayaan dunia usaha atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palopo. Inilah yang membentuk iklim investasi yang kondusif di Palopo. Indikasi ini bisa dilihat dengan makin bertumbuhnya investasi di sektor swasta yang mencapai angka Rp 164 Miliar di akhir tahun 2013. Perizinan yang mudah melalui Kantor Pelayanan Terpadu dan Badan Penanaman Modal Daerah juga adalah faktor kunci dalam pencapaian tersebut.

Investasi yang terus bertumbuh ini mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8,8 persen di tahun 2013. Sektor perdagangan menjadi motor penggerak ekonomi Kota Palopo. Investasi yang semakin bertambah dan pertumbuhan ekonomi yang semakin positif tentu linier dengan terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Dengan tertekannya angka pengangguran yang selama ini masih ada di Kota Palopo, maka hal itu tentu meningkatkan pendapatan masyarakat. Muara dari semua ini adalah dengan berkurangnya kemiskinan di Kota Palopo.

Berbagai program pengentasan kemiskinan memang patut untuk didukung. misalnya. Program ini telah mencetak 1000 wirausahawan baru di Kota Palopo. Pemberdayaan masyarakat yang didominasi perempuan ini memang mujarab meningkatkan produktifitas masyarakat. Program-program inilah yang menjadikan Pemerintah Kota Palopo kian dekat dengan masyarakatnya. Dengan kedekatan itu, maka dukungan yang besar untuk mewujudkan visi Palopo yang lebih maju sangat diharapkan dari berbagai pihak.

## **4.2 Hasil**

### **4.2.1 Ketimpangan Pembangunan**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dalam pemerataan antar daerah maka dapat digunakan indikator pemerataan yaitu Indeks Williamson. Perbandingan indeks ini dari tahun ke tahun akan menunjukkan apakah ada perubahan atau tidak. Dimana nilai koefisien Indeks Williamson yaitu dari 0 sampai 1, jika nilai koefisien mendekati 0 maka tingkat ketimpangan yang

terjadi semakin kecil dan jika nilai koefisien mendekati 1 berarti tingkat ketimpangannya semakin tinggi

Arsyad (2010) menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat Indeks Williamson sebagai berikut:

- a. Ketimpangan Tinggi jika  $IW > 0,35$
- b. Ketimpangan Sedang jika  $IW = 0,21 - 0,35$
- c. Ketimpangan Rendah jika  $IW = < 0,2$

Tabel 4.2 Ketimpangan Pembangunan di Kota Palopo Tahun 2014 – 2019

Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wara	0,349	0,359	0,384	0,325	0,340	0,284
Wara Timur	0,409	0,361	0,359	0,395	0,362	0,352
Bara	0,470	0,369	0,410	0,358	0,361	0,364
Wara Selatan	0,441	0,467	0,434	0,411	0,398	0,387
Wara Utara	0,451	0,380	0,374	0,411	0,411	0,384
Mungkajang	0,380	0,395	0,397	0,396	0,383	0,390
Wara Barat	0,500	0,423	0,386	0,384	0,382	0,350
Telluwana	0,399	0,366	0,314	0,318	0,369	0,362
Sendana	0,382	0,396	0,429	0,376	0,369	0,354
<b>Palopo</b>	<b>0,397</b>	<b>0,434</b>	<b>0,374</b>	<b>0,341</b>	<b>0,338</b>	<b>0,338</b>

Sumber data Badan Pusat Statistik Palopo

Terlihat pada Tabel 4.2 bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan yang berada di Kota Palopo selama tahun 2014 hingga 2019 dari hasil indeks Williamson mengalami fluktuasi atau naik turun. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Palopo hal ini terjadi karena tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di beberapa Kecamatan di Kota Palopo. Tingkat ketimpangan sedang terjadi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 di mana ketimpangan yang terjadi  $< 0,35$ . Sedangkan tingkat ketimpangan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014, 2015

dan 2016 yaitu  $> 0.35$ . Semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi maka akan memperburuk keadaan perekonomian suatu daerah.

#### **4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Palopo hal ini diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibanding dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi dan pula merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya kegiatan ekonomi dalam salah satu daerah. Pertumbuhan dan perkembangan PDRB Kota Palopo dapat ditinjau dari beberapa indikator makro, yaitu antara lain dari nilai tambah yang dihasilkan struktur perekonomian daerah dan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palopo pada tahun 2014-2019 atas harga konstan mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4.3. Pada tabel tersebut terlihat kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2015, 2017 dan 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu sebesar 6.47%, 6.685 dan 6.74% Hal ini disebabkan karena menurunnya lapangan usaha di bidang jasa keuangan dan asuransi yang juga berpengaruh beberapa sektor utama di Kota Palopo. Pada tahun 2016 dan 2018 pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo terus mengalami peningkatan masing-masing sebesar 6.94% dan 7.52%.

Tabel 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo 2014-2019

No	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan	Laju Pertumbuhan
1	2014	3.889.239.03	7.05
2	2015	4.140 871.84	6.47
3	2016	4.428 497.04	6.94
4	2017	4.745 899.89	6.68
5	2018	5.102 987.20	7.52
6	2019	5 .447 357.00	6.74

Sumber Data Badan Pusat Statistik Kota Palopo

#### 4.2.3 Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Sederhana bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi linier sederhana. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan komputer SPSS versi 20.

Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	57.095	31.774		1.797	.115
	TotalX	-10.829	13.759	-.285	.787	.457

a. Dependent Variable: TotalY

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi Terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo digunakan regresi linear sederhana. Analisis regresi linear berganda dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = 57.095 - 10.829X + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear sederhana di atas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 57.095 artinya jika variabel pertumbuhan ekonomi (X) dianggap konstan maka nilai Variabel ketimpangan pembangunan (Y) pada Kota Palopo adalah 57.095 persen
- b. Nilai koefisien regresi X sebesar -10.829 artinya adalah menggambarkan arah hubungan antara variabel bebas (pertumbuhan ekonomi) dengan variabel terikat (ketimpangan pembangunan) maka setiap kenaikan variabel pertumbuhan ekonomi 1 persen akan mengurangi ketimpangan pembangunan di Kota Palopo sebesar 10.829 persen

#### 4.2.4 Uji t

Pengujian regresi secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Derajat *signifikansi* adalah 0,05 Pengaruh dari variabel X (pertumbuhan ekonomi) terhadap Variabel Y (ketimpangan pembangunan) di Kota Palopo. Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-t dilakukan dengan membandingkan antara  $T_{hitung}$  dengan  $T_{tabel}$ . Untuk menentukan nilai t-tabel ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$  dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Maka didapat  $T_{tabel}$  dengan nilai 1.943 dan  $T_{hitung}$  sebesar 1.797 dengan demikian  $T_{hitung}$  lebih kecil dari  $T_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa Diketahui nilai Sig untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi (X) terhadap

Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar  $0.457 > 0.05$  dan nilai  $T_{hitung} 0.787 < T_{tabel} 1.943$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan pertumbuhan ekonomi (X) terhadap ketimpangan pembangunan (Y)

#### 4.2.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen pertumbuhan penduduk (X) terhadap variabel Dependen ketimpangan pembangunan (Y) secara serentak. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.5 hasil Uji determinasi ( $R^2$ ), yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.285 <sup>a</sup>	.081	-.050	5.46252

a. Predictors: (Constant), TotalX

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut diperoleh tabel *R Square* sebesar 0.081 atau 8.1%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan sebesar 8.1%. Sedangkan sisanya 91.9 % dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### 4.3 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo. Peneliti memperoleh hasil penelitian setelah melakukan analisis data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik berupa data pertumbuhan penduduk, data ketimpangan pembangunan dan data

Produk Domestik Regional Bruto kemudian diolah memakai SPSS versi 20. Dengan demikian diperoleh beberapa temuan dari hasil uji regresi linear sederhana, hasil uji T dan koefisien determinasi maka dapat di simpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan Liling Vera Yusica dkk (2018) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah serta variabel aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan Hendarmin (2019) Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang diperoleh dari regresi data panel pendekatan *fixed effect* ditemukan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan variabel modal manusia yang diproksi dengan IP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini juga sejalan yang dilakukan oleh Pipit Mandasari (2017) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan

Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh.

Akan tetapi dari beberapa penelitian sejalan, ada juga penelitian yang tidak sejalan antara lain :

Penelitian yang dilakukan Maretha Berlianantiya (2017) dengan judul *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur*, hasil penelitiannya adalah (1) Pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan cenderung berbentuk U, sehingga hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jawa Timur, dan nilai korelasi product moment negatif dan tidak signifikan, sehingga tidak dapat menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan (2) Pada masing-masing Bakorwil, pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi terbukti dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, demikian juga dengan nilai korelasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mara Judan Rambey (2018) *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia* Studi ini Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Menggunakan data panel dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 seluruh Provinsi di Indonesia. Analisis menggunakan persamaan regresi sederhana. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan I Komang Oka Artana Yasa (2015) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pendapatan antar daerah Provinsi Bali dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapat antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis Indeks Williamson dan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan disparitas pendapatan antar daerah Provinsi Bali tahun 2001-2012 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,29 artinya tingkat disparitas tergolong rendah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antar daerah. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Cahyono (2015) dengan judul Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo. Hasil penelitian menunjukkan ada empat tipologi ekonomi di DAS Bengawan Solo berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Kabupaten di daerah hilir lebih maju dan berkembang pesat dibandingkan dengan daerah hulu dengan kesenjangan ekonomi sedang. Secara keseluruhan kesenjangan ekonomi antar daerah di dalam DAS Bengawan Solo tergolong tinggi (0,61).

Penelitian yang dilakukan Muh. Hamid (2016) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian dengan Analisis Tipologi Klassen menggambarkan bahwa ada perbedaan pola dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yaitu: ada dua wilayah dalam Kuadran I (tumbuh cepat) dan empat wilayah dalam Kuadran IV (relatif tertinggal), serta dalam analisis Indeks Williamson memperlihatkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong rendah dengan rata-rata 0,350. Sementara Hipotesis Kuznets tentang U-Terbalik yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan belum berlaku di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2015.

Penelitian yang dilakukan Khairul Amri (2017) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. Penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Ketimpangan pendapatan pada periode tahun tertentu juga secara signifikan dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan tahun sebelumnya. Hasil panel *granger causality test* menemukan adanya *unidirectional causality* dari ketimpangan pendapatan ke pertumbuhan ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, dekripsi dan pengujian hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo. Hal ini dikarenakan Kota Palopo yang saat ini memiliki tingkat PDRB perwilayah kecamatan yang relatif tinggi, memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih lambat disamping itu dalam menghadapi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan lapangan usaha akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan pada suatu daerah.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain :

1. Agar mengembangkan penelitian lebih dalam tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo.
2. Agar melakukan penelitian tentang pengaruh pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kota Palopo dengan metode lain.
3. Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu bagi penelitian selanjutnya hendaknya mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. UPP STIMYKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 2010. *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Basri, Haris Munandar. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Berlianantiya, Maretha. 2017. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur*. Equilibrium, Volume 5, Nomor 2, Juli 2017.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Cahyono, Andy. 2015. *Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo*. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol. 12 No. 1, April 2015 : 33-44.
- Domar. 1975. *Teori Model-Model Pertumbuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dumairy. 2004. *Perekonomian Indonesia*, Cetakan kelima. Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gillis, Malcom, dkk, 2004. *Economic of Development, fourth edition*, W.W Norton & Company
- Hamid, Muh. 2016. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat*. Jurnal Univ. Islam Negeri Makassar Vol. 5 November 2017.
- Harrod R.F. 1984. *An essay in dynamic economics. Economic Journal. Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember*
- Hendarmin. 2019. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Herlina. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.

- I Komang Oka Artana Yasa.2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali*.
- Iqbal, Muhammad. 2017. *Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh*, Tataloka vol 21 No 1.
- Istiqamah, dkk.2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi di Indonesia*. E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No. 3.
- Jhingan.2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Cetakan ke 13*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khairul Amri. 2017. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Aceh.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Liling Vera Yusica, dkk. 2018. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2 Jilid 2/Tahun 2018.
- Mara Judan Rambey.2018. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Studi Ini Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*.Jurnal Fakultas Pendidikan IPS dan Bahasa.Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Volume 4 Edisi 1. Institute Pendidikan dan Bahasa Vol.4 No.1 Edisi April.
- Sastra, Eka. 2017. *Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta: Expose.
- Sidik, Machfud. 2002. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal:Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah*. Batam:Sidang Pleno X ISEI.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Baduose Media.
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar. Cet ke-20*. Jakarta: PTRaja Grafindo.
- Supangat, Andi. 2007. *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ying, Long,G. 2000. *China's Changing Regional Disparities during the Reform Period*,*Economic Geography*, Vol. XXIV No. 7. 59-70.

\_\_\_\_\_, 2012.*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jakarta: Jurnal Buletin Prisma.

\_\_\_\_\_. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.